

REVITALISASI APLIKASI RUMAHKUSIP PADA DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GRESIK

Anisaul Hasanah*¹, Dini Ayu Pramitasari², Mochamad Syafii³, Bustanul Ulum⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Universitas Gresik

anisaulhasanah08@gmail.com¹, da.pramitasari@gmail.com², syafiimochamad87@gmail.com³,

Bustanululum46@gmail.com⁴

DOI: <https://doi.org/10.58705/jam.v2i4.196>

Abstrak

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Selama ini penyediaan basis data yang dilakukan masih lemah diakibatkan oleh kurangnya sinergi antar OPD dalam pemanfaatan data bersama. Disamping penyediaan basis data (yang selanjutnya disebut pendataan), pemerintah daerah juga mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman. Penyelenggaraan pendataan dan pengawasan yang tidak efektif menyebabkan banyaknya perubahan dan/atau alih fungsi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) serta banyaknya rumah yang berubah bentuk dan luasannya serta tidak sesuai dengan IMB. Di sisi lain, tidak terinformasinya data perumahan kepada masyarakat mengakibatkan adanya permasalahan seperti tidak terbangunnya PSU yang seharusnya menjadi hak masyarakat, pembangunan perumahan yang terbengkalai dan adanya perumahan yang telah ditinggalkan pengembang sebelum serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah. Bertolak dari permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik mengembangkan sistem informasi berbasis Sistem Informasi Geografis bernama RUMAHKU SIP (Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan)

Kata kunci: Aplikasi, RUMAHKUSIP, Sistem Informasi

Abstract

The regional government in carrying out guidance on the administration of housing and settlement areas has the authority to compile and provide housing and settlement area databases. So far, the provision of databases has been weak due to a lack of synergy between OPDs in the utilization of shared data. In addition to providing a database (hereinafter referred to as data collection), regional governments also have the task of supervising and controlling housing and residential areas. The ineffective implementation of data collection and supervision has resulted in many changes and/or conversion of the function of Public Utilities Infrastructure and Facilities (PSU) as well as the number of houses that have changed in shape and size and are not in accordance with the IMB. On the other hand, the lack of information on housing data to the public has resulted in problems such as the failure to build a PSU that should be the right of the community, abandoned housing developments and housing that has been abandoned by the developer prior to the handover of the PSU from the developer to the government. Starting from these problems, the Gresik Regency Government developed an information system based on a Geographic Information System called RUMAHKU SIP (Special and General House in Data Collection and Monitoring Information Systems).

Keywords: Application, RUMAHKUSIP, Information System

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang serba digital atau lebih dikenal dengan era modern, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain dikarenakan mempermudah proses kegiatan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengakses informasi publik yang berimplikasi pada mobilitas masyarakat. Bahkan, kemajuan TIK tersebut dapat mempengaruhi kemajuan sebuah masyarakat (society). Perkembangan teknologi saat ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk mempermudah proses pelayanan publik kepada masyarakat terutama dalam mengakses informasi publik, sarana penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk menciptakan electronic government berupa aplikasi “ **RUMAHKU SIP** “ sebagai alternatif untuk mengolah informasi dalam mewujudkan informasi pengetahuan masyarakat yang baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pihak pengembang perumahan Insatnsi yang terkait dalam informasi aplikasi “ **RUMAHKU SIP** “ sebagai alat informasi kepada masyarakat terkait informasi perumahan dan Rusunawa yang ada di Kabupaten Gresik

Pemerintah Kabupaten Gresik yang sejak 01 April 2018 telah meluncurkan sebuah aplikasi yang memuat pelayanan publik meyang dapat diakses oleh masyarakat melalui <https://rumahkusip.gresikkab.go.id> Aplikasi “ **RUMAHKU SIP** “ adalah sebuah media pelaporan/peyampaian keluhan masyarakat dan informasi pada masyarakat melalui aplikasi terkait informasi data, lokasi, luasan perumahan mengenai perumahan dan Rusunawa yang dikelola Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

Aplikasi yang diberi nama “ **RUMAHKU SIP** “ ini memungkinkan masyarakat untuk dapat secara langsung memberikan laporan maupun keluhan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dengan cepat. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dapat menanggapi keluhan maupun laporan masyarakat tersebut mengenai keluhan permasalahan Warga yang berada di dalam perumahan secara langsung. Aplikasi tersebut dikelola oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. melalui kepala bidang Perumahan serta bidang Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Selama ini penyediaan basis data yang dilakukan masih lemah diakibatkan oleh kurangnya sinergi antar OPD dalam pemanfaatan data bersama. Disamping penyediaan basis data (yang selanjutnya disebut pendataan), pemerintah daerah juga mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan

permukiman, kurangnya data yang valid dan lengkap menyebabkan pengawasan yang dilakukan selama ini kurang efektif. Penyelenggaraan pendataan dan pengawasan yang kurang efektif mengakibatkan lemahnya kontrol terhadap keberlangsungan penyelenggaraan perumahan oleh pengembang. Di sisi lain, kurang terinformasikan status perizinan serta keberadaan PSU kepada masyarakat mengakibatkan adanya permasalahan seperti tidak terbangunnya PSU yang seharusnya menjadi hak masyarakat, pembangunan perumahan yang terbengkalai dan adanya perubahan-perubahan bentuk dan luasan bangunan rumah. Bertolak dari permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik mengembangkan sistem informasi berbasis geografis bernama RUMAHKU SIP (Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan).

Aplikasi RUMAHKU-SIP adalah aplikasi Rumah khusus dan Rumah Umum dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pemantauan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik yang dibangun Sejak Tahun 2018. Aplikasi RUMAHKU-SIP dapat diakses melalui web : <http://rumahkusip.gresikkab.go.id/>. Kelebihan pada aplikasi RUMAHKUSIP yang berdampak nyata adalah Keakuratan karena penggunaan drone dan survei lapangan, terintegrasi karena lengkapnya atribut data hingga melacak NIK dan NOP, serta kecepatan pelaporan. Capaian RUMAHKUSIP selama dua tahun berjalan antara lain: telah terdatanya jumlah perumahan sebanyak 174 pada tahun 2018 dan 238 pada tahun 2019 yang mana 141 perumahan telah dilakukan pemantauan. Sedangkan untuk Vitur aplikasi yang sudah ada pada aplikasi RUMAHKU-SIP saat ini adalah vitur data rumah komersial, Vitur data perumahan, Vitur Rumah Negara. Sedangkan untuk vitur Rumah Susun belum terkoneksi dengan aplikasi RUMAHKU-SIP. Untuk itu dengan adanya sistem aplikasi RUMAHKU-SIP diharapkan dapat menambah vitur Rumah Susun pada aplikasi tersebut, sehingga mendukung inovasi untuk kemajuan Kota Gresik menjadi Gresik Baru. Dan data Hunian Rumah Susun dapat terakomodir pada Aplikasi RUMAHKU-SIP. Dengan penambahan melalui Vitur Rumah Susun tersebut sangat membantu seperti adanya transparansi data oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemantauan serta pendataan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk kedepannya ketersediaan data Rusunawa dijamin akan lebih akurat karena memanfaatkan IT. Selain itu juga dapat memudahkan usulan/pengajuan ke pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR sesuai dengan Permen PUTR no.1/PRT/2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun.

2. METODE

Berikut merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka implementasi aksi perubahan, yang terdiri dari tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang.

1. Mentor

Bertindak sebagai pengarah, pembimbing memberikan petunjuk dan dukungan penuh serta memberikan persetujuan pelaksanaan aksi perubahan

2. Coach

Memberikan bimbingan, konsultasi dan persetujuan pelaksanaan aksi perubahan

3. Project Leader (Pemimpin Aksi Perubahan)

- Memimpin pelaksanaan Aksi Perubahan

4. Tim I (Pembangun vitor Aplikasi Rumahku)

Koordinator : Kepala Seksi Pendataa dan perencanaan rumah umum

Anggota : 2 Staf Pelaksana, dengan tugas :

- Menyiapkan materi, sarana dan prasarana untuk membangun sistem penambahan vitor aplikasi RUMAHKU-SIP
- Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dan Tim yang lain pembangunan penambahan vitor aplikasi RUMAHKU-SIP

5. TIM II (Pengumpul Data)

Koordinator : Kepala UPT Rumah Susun

Anggota : 2 Staf Pelaksana, dengan tugas :

- Memilah dan menginventarisir seluruh Dokumen daftar hunian Rumah Susun termasuk Elektronika dan Telematika yang layak masuk dalam data base aplikasi berbasis IT
- Mengimput seluruh dokumen Data Hunian Rumah susun ke aplikasi RUMAHKU-SIP

6. TIM III (Keseekretariatan)

Koordinator : 1 Staf Pelaksana Seksi pendataan dan Perencanaan rumah umum

Anggota : 2 Staf Pelaksana

- Merencanakan dan melaksanakan rapat Tim
- Mengkoordinasi kegiatan surat-menyurat dan keseekretariatan lainnya terkait aksi perubahan

7. Narasumber (Dinas KOMINFO)

Memberikan masukan terkait dengan penambahan vitor aplikasi RUMAHKU-SIP

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melaksanakan Konsultasi dengan coach dan mentor.

Kegiatan ini diselenggarakan ditengah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga konsultasi dengan *coach* tidak dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Meskipun begitu kegiatan konsultasi dengan *coach* tetap dilakukan karena hal ini termasuk salah satu bentuk penerapan integritas dari seorang pemimpin. Selain itu dalam melakukan konsultasi dengan *coach* juga memperhatikan nilai integritas yang lain yaitu dengan menerapkan disiplin terhadap waktu, transparansi, serta tetap memperhatikan etika.

2. Pembentukan Tim Efektif

Di tengah kondisi seperti ini dibutuhkan pemimpin perubahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara professional. Hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan butuh berbagai pemikiran dan perubahan *mindset* bagaimana menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Joseph C.Rost berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan yang sama. George P Terry juga berpendapat Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok .Dengan pembentukan Tim Efektif dan proses pengesahan SK tim oleh Kepala Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Gresik adalah salah satu bentuk integritas dari pemimpin dengan memberikan dukungan terhadap aksi perubahan.

3. Identifikasi Kebutuhan penyusunan penambahan fitur aplikasi

Pada kegiatan ini dilakukan koordinasi **Menurut** Handoko (2003 : 195), **koordinasi** adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Untuk itu perlu melakukan koordinasi dengan kepala UPT rusunawa selaku tim pengumpul data yaitu memberikan informasi kebutuhan data yang akan dimasukkan dalam aplikasi penambahan fitur RUMAHKUSIP.

4. Penyusunan desain dan penambahan Fitur aplikasi ‘RUMAHKU SIP’

Pada kegiatan ini dilakukan koordinasi dengan staf IT pada bidang rumah Umum selaku tim IT pada tim efektif implementasi aksi perubahan penambahan aplikasi fitur RUMAHKUSIP untuk membuat konsep penambahan desain rumah susun . *Menurut* Soekarno dan Lanawati Basuki, pengertian *desain* adalah suatu pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Pola rancangan desain rumahku sip untuk rumah susun dapat dikonsept oleh tim IT dan diterima oleh mentor.

5. Uji coba penggunaan Vitur aplikasi “RUMAHKU-SIP”

Uji coba dilakukan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penambahan vitur rumah Susun sudah bias masuk dalam sistem Aplikasi Rumahkusip yang dilakukan oleh tim It pada bidang rumah umum Dinas Perumahan dan kawasan permukiman . Nilai integritas yang diterapkan diantaranya adalah tanggung jawab dan kejujuran dalam melakukan uji coba aplikasi dan yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem aplikasi vitur Hunian rusun .

6. Rapat Koordinasi Tim Efektif

Rapat koordinasi tim efektif dilakukan oleh anggota tim efektif , leader dan mentor untuk mengevaluasi tim efektif dalam melaksanakan tugasnya masing masing . Nilai integritas yang diterapkan diantaranya adalah tanggung jawab dan kejujuran dalam melakukan kegiatan pembuatan penambahan vitur aplikasi RUMAHKUSIP.

7. Finalisasi Aplikasi vitur penambahan hunian Rumah Susun *pada* aplikasi “RUMAHKU-SIP”

Menurut Kumorotomo, dkk (2015), etika dipandang sebagai karakter atau etos individu/kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Etika Integritas Pada penambahan vitur Hunian rusun setelah dilakukan pembenahan pada data antrian dan selanjutnya dilakukan vinalisasi berupa sk finalisasi fitur penambahan Rumah Susun. Dalam kegiatan finalisasi aplikasi penambahan vitur hunian rumah susun ini budaya pelayanan berupa pemanfaatan IT yaitu menggunakan computer PC dan membuat sk finalisasi penambahan Rumah Susun menggunakan MS. Word .selanjutnya di konsultasikan kepada mentor dan selanjutnya diajukan ke sekpri kepala dinas Perumahan dan kawasan permukiman selanjutnya dinaikkan ke kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk ditanda tangani . SK finalisasi setelah di tandatangani menjadi dasar vinalisasi aplikasi penambahan rumahkusip.

Berikut hasil capaian aksi perubahan yang tertuang dalam bentuk tabel

Tabel 1. HASIL CAPAIAN AKSI PERUBAHAN

Tahapan	Bobot Target	Target Capaian	Realisasi Output	Keterangan
Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan mentor dan <i>coach</i> /pembimbing terkait rancangan aksi yang akan dibuat	10%	10 % (12 kegiatan)	10% (12 kegiatan)	Sesuai target

Pembentukan Tim Efektif	5%	5 % (1 kegiatan)	5 % (1 kegiatan)	Sesuai target
Identifikasi kebutuhan penyusunan penambahan fitur aplikasi	5%	5 % (1 dokumen)	5 % (1 dokumen)	Sesuai target
Penyusunan desain dan penambahan pembuatan fitur aplikasi RUMAHKUSIP	5%	5 % (1 dokumen)	5 % (1 dokumen)	Sesuai target
Uji coba penggunaan fitur aplikasi Rumahkusip	5%	5 % (1 aplikasi)	5 % (1 aplikasi)	Sesuai target
Rapat kordinasi tim efektif	10%	10 % (1 kegiatan)	10 % (1 kegiatan)	Sesuai target
Finalisasi aplikasi fitur penambahan hunian Rumah Susun pada aplikasi RUMAHKUSIP	5%	5 % (1 kegiatan)	5 % (1 kegiatan)	Sesuai target
Penyusunan manual book aplikasi	5%	5 % (1 dokumen)	5 % (1 dokumen)	Sesuai target
Penunjukan staf yang bertanggung jawab tentang entri dataadmin dalam pendataan Hunian rusun	5%	5 % (1 dokumen)	5 % (1 dokumen)	Sesuai target
SOP	10%	10 % (1 dokumen)	10 % (1 dokumen)	Sesuai target
Sosialisasi penggunaan fitur hunian rumah susunpada Aplikasi Rumahkusip	10%	10 % (1 kegiatan)	10 % (1 kegiatan)	Sesuai target
Melakukan implementasi Aplikasi dan pendataan 2 blok	15%	15 % (1 kegiatan)	15 % (1 kegiatan)	Sesuai target

untuk hunian rusun				
Evaluasi kegiatan jangka pendek	10%	10 % (1 kegiatan)	10 % (1 kegiatan)	Sesuai target
Jumlah	100 %	100 %	100	

4. KESIMPULAN

Implementasi aksi perubahan yang berjudul “ *Revitalisasi Rumahkusip pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman* “ telah selesai dilaksanakan oleh pemimpin aksi perubahan .Pembahasan Aksi Perubahan tentang Penambahan vitur rumah susun pada aplikasi RUMAHKUSIP melalui penambahan aplikasi vitur , pembuatan panduan manual book, pembuatan data daftar hunian rusun. Berdasarkan isu yaitu belum adanya Pendataan Rumah susun pada sistem pendataan Aplikasi yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah, yaitu : Reviralisasi sistem virtual aplikasi yang mendukung pendataan rumah umum, mengidentifikasi kebutuhan penyusunan penambahan vitur aplikasi, dan melakukan pendataan unit hunian rusun

Rekomendasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan aksi perubahan yaitu dengan memperhatikan tabel hasil capaian aksi perubahan yang merupakan tahapan untuk mencapai tujuan jangka pendek aksi perubahan maka berdasarkan hasil capaian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap kegiatan terealisasi sesuai dengan yang direncanakan, dan sesuai hasil capaian kegiatan bahwa pelaksanaan aksi perubahan ini mampu mewujudkan kinerja kegiatan dengan capaian sebesar 92 %, yaitu terwujudnya penambahan vitur rumah susun pada aplikasi rumahkusip terwujudnya pendataan 2 hunian rumah susun yaitu rusun gulomantung dan rusun kebomas .

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- [2]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- [3]Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- [4]Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- [5]Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
- [6]Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 01/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
- [7]Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- [8] Hani Handoko, 2003. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Indonesia
- [9]Kumorotomo, W., dkk. 2015. Etika Publik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.